

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari paradoks bahwa Pertamina New Renewable Energy (NRE) memiliki kapasitas, mandat, dan ambisi besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, sekaligus memegang posisi penting di tingkat regional melalui kepemimpinan dalam *Clean Energy Task Force* (CETF) di bawah ASCOPE, tetapi belum terintegrasi secara formal dalam skema operasional *ASEAN Power Grid* (APG) yang menjadi tulang punggung rezim energi terbarukan di Asia Tenggara. Dengan menggunakan perspektif neoliberalisme institusional, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana Pertamina NRE mempersepsikan APG sebagai rezim energi terbarukan dan sejauh mana institusi kawasan tersebut dipandang relevan dengan strategi pengembangan energi bersih perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertamina NRE memaknai APG sebagai institusi regional yang memiliki dimensi ekonomi, institusional, dan reputasional yang saling terkait. Dari sisi ekonomi, APG dipandang sebagai peluang strategis untuk mengonversi keunggulan komparatif sumber daya energi terbarukan Indonesia, terutama panas bumi, surya, dan biomassa, menjadi keunggulan kompetitif melalui akses ke pasar listrik kawasan. Pertamina NRE melihat potensi untuk memanfaatkan cadangan panas bumi Indonesia sebagai *baseload* yang andal bagi sistem interkoneksi regional, sehingga Indonesia tidak hanya bergantung pada pasar domestik, tetapi dapat berperan sebagai pemasok utama listrik bersih bagi negara-negara ASEAN yang menghadapi keterbatasan sumber daya. Dalam kerangka ini, APG dipersepsikan sebagai instrumen yang memungkinkan perusahaan mengejar keuntungan mutlak (*absolute gains*) tanpa

harus terjebak pada logika persaingan antarnegara yang menekankan keuntungan relatif.

Secara institusional, APG dipahami Pertamina NRE sebagai rezim yang dirancang untuk mengurangi ketidakpastian dan hambatan transaksi yang selama ini menghambat kerja sama energi lintas batas. Keberadaan dokumen kerangka seperti *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC)*, *Enhanced Memorandum of Understanding (MoU)*, dan *ASEAN Interconnection Masterplan Study (AIMS)* dinilai memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai arah pengembangan interkoneksi, standar teknis, dan target bauran energi terbarukan kawasan. Bagi Pertamina NRE, aturan dan norma yang dibentuk dalam kerangka APG berpotensi menurunkan biaya koordinasi, memperkecil risiko regulatif, dan meningkatkan kepastian bagi investasi jangka panjang di sektor energi terbarukan, sehingga kerja sama tidak lagi semata-mata bergantung pada negosiasi bilateral yang fragmentaris dan rentan berubah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa persepsi Pertamina NRE terhadap APG tidak sepenuhnya positif dan masih bercampur dengan pandangan kritis terhadap keterbatasan aktual rezim tersebut. Meskipun secara normatif APG dirancang untuk mengurangi biaya transaksi, dalam praktiknya Pertamina NRE masih melihat adanya fragmentasi regulasi nasional, perbedaan struktur pasar listrik, serta belum adanya skema yang jelas bagi aktor korporasi *non-focal point* untuk masuk ke dalam mekanisme perdagangan listrik kawasan. Posisi PT PLN sebagai focal point nasional dalam APG membuat akses Pertamina NRE masih harus dimediasi melalui kebijakan dan keputusan negara, sehingga ruang manuver perusahaan di tingkat regional bergantung pada sejauh mana pemerintah membuka dan mengatur peran BUMN energi lain di luar PT PLN. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas rezim energi tidak hanya ditentukan oleh desain institusional di tingkat regional, tetapi juga oleh konfigurasi tata kelola domestik dan pembagian mandat di dalam negeri. Dari perspektif reputasional, Pertamina NRE memaknai APG sebagai arena jangka panjang untuk membangun citra,

kredibilitas, dan kepemimpinan Indonesia dalam transisi energi di Asia Tenggara. Keterlibatan aktif dalam forum-forum energi kawasan, baik melalui APG maupun ASCOPE, dilihat sebagai investasi untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dan Pertamina NRE dalam pembentukan norma, standar, dan agenda kerja sama energi bersih di masa depan. Komitmen terhadap pengembangan energi terbarukan, partisipasi dalam inisiatif pembiayaan hijau, dan konsistensi dalam mendorong proyek-proyek lintas batas dinilai berkontribusi pada *shadow of the future* yang mendorong aktor untuk menjaga kepercayaan dan kerja sama jangka panjang. Dalam kerangka ini, APG tidak sekadar dilihat sebagai proyek teknis, tetapi sebagai panggung strategis untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi pusat gravitasi energi bersih kawasan.

Secara substantif, penelitian ini menegaskan bahwa Pertamina NRE melihat APG sebagai rezim yang relevan dengan tiga kebutuhan utama perusahaan. Pertama, kebutuhan untuk memperluas pasar dan mengamankan keuntungan ekonomi dari portofolio energi bersih yang sedang dikembangkan. Kedua, kebutuhan akan kepastian institusional yang dapat mengurangi risiko investasi dan mempermudah koordinasi lintas negara di tengah kompleksitas regulasi energi. Ketiga, kebutuhan untuk memperkuat posisi Indonesia dan Pertamina NRE dalam narasi dan praktik transisi energi regional yang semakin dipengaruhi oleh komitmen dekarbonisasi global dan tekanan perubahan iklim. Dengan demikian, persepsi Pertamina NRE terhadap APG bersifat instrumental sekaligus normatif, bahwa rezim dipandang bermanfaat sejauh mampu menyediakan insentif konkret, tetapi juga penting sebagai wadah untuk menunjukkan komitmen pada tata kelola energi yang lebih berkelanjutan.

Dari sisi teoritis, penelitian ini mengkonfirmasi relevansi neoliberalisme institusional untuk memahami perilaku aktor non-negara dalam rezim energi regional. Pertamina NRE tidak memaknai APG sebagai struktur yang membatasi secara kaku, tetapi sebagai mekanisme yang dapat dimanfaatkan untuk mengejar kepentingan korporasi melalui kerja sama yang terinstitusionalisasi. Institusi

dipahami sebagai sarana untuk menurunkan ketidakpastian, memastikan prediktabilitas, dan menciptakan pola interaksi berulang yang menguntungkan seluruh pihak yang terlibat. Temuan ini memperkaya literatur hubungan internasional yang selama ini cenderung menitikberatkan analisis rezim energi pada negara dan organisasi internasional, dengan menunjukkan bahwa aktor korporasi juga memiliki kalkulasi rasional yang dipengaruhi oleh struktur insentif yang dibangun rezim.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertamina NRE mempersepsikan APG sebagai rezim energi terbarukan yang penting dan potensial, tetapi sekaligus belum sepenuhnya inklusif dan fungsional dari sudut pandang aktor korporasi. Di satu sisi, APG memberikan visi integrasi energi yang sejalan dengan ambisi Pertamina NRE untuk menjadi pemain utama energi bersih di Asia Tenggara. Di sisi lain, berbagai hambatan struktural dan institusional baik di tingkat nasional maupun regional membuat perusahaan ini masih berada dalam posisi menunggu ruang formal yang lebih jelas untuk terlibat. Implikasi utama dari temuan ini adalah bahwa keberhasilan APG sebagai rezim energi terbarukan tidak hanya ditentukan oleh komitmen negara anggota, tetapi juga oleh sejauh mana rezim mampu membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi aktor korporasi seperti Pertamina NRE sebagai motor investasi, inovasi, dan implementasi transisi energi di kawasan.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian tentang persepsi Pertamina NRE terhadap ASEAN Power Grid, ada beberapa saran yang dapat diajukan. Saran-saran ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu saran praktis dan saran teoritis.

6.2.1 Saran Praktis

Saran praktis ini ditujukan langsung kepada para pembuat keputusan dan praktisi di lapangan agar dapat meningkatkan kerja sama energi di kawasan ASEAN.

6.2.2.1 Saran Bagi Pertamina NRE

Pertamina NRE perlu memperkuat posisinya dalam APG melalui tiga langkah konkret. Pertama, mengembangkan portofolio proyek panas bumi dan energi terbarukan yang dirancang khusus untuk perdagangan lintas batas sesuai kebutuhan pasar regional. Kedua, memanfaatkan kepemimpinan di *Clean Energy Task Force* (CETF) ASCOPE untuk mendorong harmonisasi standar teknis dan mekanisme pembiayaan yang lebih jelas di tingkat ASEAN. Ketiga, membentuk tim khusus yang memahami diplomasi energi kawasan dan analisis kebijakan regional agar perusahaan dapat merespons dinamika APG dengan cepat.

6.2.2.2 Saran bagi Pemerintah Indonesia dan Pemangku Kepentingan Nasional

Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN, perlu mengambil beberapa langkah konkret. Pemerintah harus mengambil empat tindakan penting. Pertama, memperjelas pembagian peran antara PLN dan Pertamina NRE dalam APG untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Kedua, membuat regulasi yang memberi ruang lebih besar bagi Pertamina NRE untuk terlibat langsung dalam skema APG. Ketiga, menyesuaikan tarif listrik, mekanisme wheeling, dan perizinan lintas batas dengan standar ASEAN agar transaksi energi lebih efisien. Keempat, membangun koordinasi yang kuat antara PLN, Pertamina NRE, Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga keuangan negara dalam merancang strategi partisipasi Indonesia di APG yang jelas dan terukur.

6.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori neoliberalisme institusional yang relevan, namun memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Teori ini cenderung mengabaikan peran kekuasaan dalam institusi internasional. Dalam praktiknya, institusi tidak selalu netral karena PLN

yang mendominasi menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan akses dalam rezim APG yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh teori ini. Selain itu, teori ini terlalu fokus pada perhitungan ekonomis dan mengabaikan faktor-faktor penting seperti nilai perusahaan, identitas korporat, tekanan pemerintah, dan norma sosial yang turut membentuk persepsi aktor.

Untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, membandingkan persepsi perusahaan energi dari Malaysia, Singapura, atau Vietnam terhadap APG guna memahami bagaimana variasi konteks nasional mempengaruhi persepsi aktor korporasi. Kedua, melibatkan aktor lain seperti lembaga keuangan, regulator regional, dan organisasi lingkungan untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang rezim APG.

Ketiga, menggabungkan metode kualitatif dengan analisis kuantitatif seperti pemodelan perdagangan listrik atau perhitungan pengurangan emisi agar hasilnya lebih meyakinkan. Keempat, mengintegrasikan perspektif lain seperti teori konstruktivisme untuk memahami peran norma dan identitas, teori realisme untuk menganalisis dinamika kekuasaan, dan analisis ekonomi politik kritis untuk melihat bagaimana struktur global mempengaruhi rezim energi regional. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan ini, penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana rezim energi terbarukan regional bekerja dan bagaimana aktor korporasi berinteraksi di dalamnya.